swara mahasiswa

Perjuangan Melawan Lupa

Oleh: A. P. Edi Atmaja

Milan Kundera, pemikir Ceko yang karyanya banyak dijadikan referensi ilmuwan sosial di Indonesia, pernah berujar, "Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa."

Mengapa melawan lupa? Ada apa dengan kealpaan sehingga ia mesti dilawan? Barangkali jawabannya karena dari lupa-lah segala anasir ketertindasan itu berasal. Dengan melawan lupa—yang timbul dari dalam diri—setidak-tidaknya kita telah mencoba memulai perlawanan atas sesuatu yang muncul dari luar: kekuasaan yang menindas.

Maka, semangat perlawanan ala Milan Kundera ini ada baiknya selalu digelorakan di tengah situasi negara yang carut-marut seperti sekarang ini. Presiden, menanggapi kontroversi kasus mafia pajak Gayus Tambunan, menerbitkan 12 instruksi kepada para bawahannya. Tujuannya, supaya sengkarut di sekitar pajak dapat segera diselesaikan, dan menjadi jelas siapa saja aktor yang bermain di dalamnya.

Instruksi tertanggal 17 Januari 2011 tersebut memuat perintah Presiden supaya perkembangan kasus Gayus diumumkan kepada khalayak ramai saban dua minggu. Di samping itu, perlu segera dilakukan penyelidikan secara saksama soal bagaimana Gayus bisa melenggang bebas ke luar terali besi, mekanisme penerbitan paspornya, hingga pengungkapan oknum-oknum rutan yang kemudian meloloskannya.

Namun, perkembangan mutakhir kasus Gayus ini rupanya tidak ketahuan lagi rimbanya. Isu tersebut seakan-akan menguap begitu saja, tidak perlu digembar-gemborkan lagi. Instruksi Presiden (di-) mandek (-kan) di tengah jalan. Betulkah publik telah benar-benar lupa? Ternyata tidak. Tulisan Budiman Tanuredjo di Kompas (4/3) sedikitnya membuktikan hal itu. Alih-alih lupa, publik justru nampak skeptis dan apatis. Karena, menurut beberapa komentar sinis, perkembangan kasus itu "sudah ke Selat Sunda".

Sungguh mengherankan, memang, betapa instruksi yang sangat gamblang semacam itu kini tak ketahuan lagi juntrungannya. Jangan-jangan memang benar, wibawa Presiden sebagai orang nomor satu di negeri ini telah keropos. Atau, para bawahannya, eksekutor instruksi itu, memang tak bisa diatur dan tak mau patuh pada atasan.

Kita tidak tahu berapa miliar—atau lebih—uang yang berhasil dikeruk Gayus dan kini dipergunakannya buat mempermainkan hukum beserta aparat-aparatnya. Kita tahu Gayus hanyalah teri dalam kasus ini. Kita yakin masih banyak kakap, bahkan paus, yang sama sekali belum terendus dan mesti disingkap demi menyelamatkan uang rakyat.

Untuk itulah, kita, publik, rakyat, pihak yang kepentingannya paling dirugikan oleh mafia pajak atau koruptor macam apa pun, jangan sampai gampang lupa lantas terlena, apalagi abai terhadapnya. Buat memberantas perilaku korup di negeri ini, kita perlu ingatan yang sangat kuat. Seperti kata Milan Kundera, kita harus melawan lupa.

A.P. Edi Atmaja
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Rubrik Swara Mahasiswa menerima artik
Tulisan dikirimkan melalui e-mail:swara.ka
3000 karakter (dengan spas